

**PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
RSUD KABUPATEN NUNUKAN**

¹⁾Elisabeth Oka, ²⁾Nugraeni

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
E-mail: elisabethoka60@gmail.com

Abstract

This study was conducted to determine and analyze the effect of public sector accounting implementation on financial transparency and accountability at Nunukan Regional Hospital. The population used was all employees of Nunukan Regional Hospital who were directly involved in the process of recording, reporting, monitoring, and managing hospital finances. The sampling technique in this study was purposive sampling. The analysis tool used was SPSS. Furthermore, all research instruments (questionnaires) used met the validity and reliability criteria, ensuring the data collected were accurate and consistent. The classical assumptions for the multiple linear regression model, especially the assumption of residual normality, were met, indicating that the regression model was valid and the estimation results were unbiased. The multicollinearity test was not relevant because there was only one independent variable in the model. The results of the t-test study showed that public sector accounting implementation had no significant effect on financial transparency at Nunukan Regional Hospital ($t=0.175$; $p=0.862>0.05$). The very low coefficient of determination ($R^2=0.2\%$) indicated that variations in financial transparency were almost entirely influenced by factors other than public sector accounting implementation. Thus, hypothesis 1, which stated a significant effect, was rejected. The t-test results indicate that the implementation of public sector accounting significantly impacts financial accountability at Nunukan Regional Hospital, with a significance value of 0.005 (<0.05).

Keywords: public sector accounting, transparency, financial accountability

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan lembaga sektor publik yang berperan dalam Pelayanan kesehatan masyarakat dan menggunakan dana yang berasal dari APBD maupun sumber Keuangan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan sesuai dengan Standar akuntansi sektor publik (SAP). Transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan dua pilar penting dalam Good Governance. Transparansi berarti bahwa semua informasi terkait dengan pengelolaan keuangan RSUD harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas berarti bahwa RSUD harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Akuntansi sektor publik yang diterapkan di RSUD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Implementasi akuntansi sektor publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan serta akuntabilitas

dalam penggunaan dana publik. Namun, dalam praktiknya, implementasi akuntansi sektor publik di RSUD seringkali menghadapi Berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang umum dihadapi antara lain, keterbatasan Sumber Daya Manusia (kurangnya tenaga ahli akuntansi yang memiliki pemahaman yang baik tentang SAP menjadi kendala dalam implementasi akuntansi sektor publik di RSUD). Keterbatasan Anggaran (Implementasi sistem akuntansi yang modern dan sesuai dengan SAP membutuhkan investasi yang besar. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghalang bagi RSUD Untuk melakukan investasi tersebut). Resistensi Terhadap Perubahan (Perubahan sistem akuntansi seringkali menimbulkan resistensi dari internal organisasi). Hal ini dapat menghambat implementasi akuntansi sektor publik di RSUD.

Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan di sektor kesehatan. Keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana Implementasi akuntansi sektor publik telah diterapkan di RSUD Kabupaten Nunukan serta pengaruhnya terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan rumah sakit tersebut.

Berdasarkan teori agensi dan teori akuntabilitas, implementasi akuntansi sektor publik yang baik diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan pada lembaga sektor publik. Penelitian-penelitian terdahulu (misalnya Erwiyanti, 2022; Anjani & Hapsari, 2024; Animah et al., 2023) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang efektif, didukung oleh kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi yang memadai, dapat memperkuat transparansi laporan keuangan dan mendorong akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan dua hipotesis utama:

H1: Implementasi akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan RSUD Kabupaten Nunukan.

H2: Implementasi akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan RSUD Kabupaten Nunukan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan data numerik dan analisis statistik. Pendekatan asosiatif digunakan untuk menganalisis pengaruh implementasi akuntansi sektor publik terhadap transparansi keuangan dan akuntabilitas keuangan di RSUD Kabupaten Nunukan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan. RSUD Kabupaten Nunukan merupakan rumah sakit umum yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayahnya sebagai daerah perbatasan, yang mungkin memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan sektor publik dan implementasi akuntansi sektor publik.

Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan pada tahun 2024. Namun, periode pengamatan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini mencakup data keuangan dan informasi terkait implementasi akuntansi sektor publik selama 3 (tiga) tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Pengambilan data selama periode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan representatif mengenai tren dan perkembangan implementasi akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan di RSUD Kabupaten Nunukan.

Populasi dan Sampel**Populasi**

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai RSUD Kabupaten Nunukan yang terlibat langsung dalam proses pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan pengelolaan keuangan rumah sakit. Populasi ini dipilih karena dianggap memiliki pemahaman yang relevan terhadap implementasi akuntansi sektor publik serta pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan meliputi, bagian akuntansi dan keuangan, Auditor internal, dan Manajemen rumah sakit

Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria responden yang dijadikan sampel adalah:

- Pegawai RSUD kabupaten Nunukan yang memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang akuntansi sektor publik.
- Pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan atau sistem akuntansi di RSUD

Jenis dan Sumber Data**Jenis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur pengaruh implementasi akuntansi sektor publik terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan di RSUD Kabupaten Nunukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menguji hipotesis secara statistik dan menyimpulkan hubungan antar variabel secara ilmiah.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh implementasi akuntansi sektor publik terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan RSUD Kabupaten Nunukan berasal dari sumber primer. Penggunaan jenis sumber data ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Data Primer

Kuesioner yang diberikan kepada pegawai RSUD dan rekan mahasiswa kampus terkait implementasi akuntansi sektor publik.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel dalam penelitian terdahulu. Kuesioner ini diadaptasi dan dimodifikasi dari penelitian Erwiyanti (2022) yang meneliti penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan RSUD, serta penelitian Anjani dan

Hapsari (2024) yang menguji pengaruh implementasi akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Instrumen kuesioner menggunakan skala Likert 1–5 (Sangat Tidak Setuju sampai Sangat Setuju) untuk mengukur persepsi responden mengenai implementasi akuntansi sektor publik, transparansi keuangan, dan akuntabilitas keuangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Wilayah ini resmi menjadi daerah otonom setelah dimekarkan dari Kabupaten Bulungan pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Posisi ini menjadikan Nunukan sebagai pintu gerbang internasional dan kawasan perbatasan yang memiliki peran penting secara geopolitik, sosial, dan ekonomi.

Kabupaten Nunukan memiliki 21 kecamatan serta ratusan desa dan kelurahan, dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Nunukan. Wilayahnya seluas lebih dari 14.000 km² mencakup daratan dan kepulauan, termasuk Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi geografis tersebut menyebabkan Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan.

Dari sisi demografi, penduduk Kabupaten Nunukan bersifat heterogen dan multietnis. Suku asli seperti Tidung dan Dayak hidup berdampingan dengan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bugis, Jawa, Toraja, dan Batak. Keragaman ini memperkaya budaya lokal dan menciptakan dinamika sosial yang unik. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta jasa, termasuk layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan sangatlah vital. RSUD ini merupakan rumah sakit rujukan utama di wilayah perbatasan yang melayani pasien tidak hanya dari seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan, tetapi juga dari warga perbatasan yang kerap datang untuk mendapatkan layanan medis. Karena lokasinya yang jauh dari pusat provinsi serta keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, RSUD Nunukan memegang peran strategis dalam menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan.

Sebagai institusi publik, RSUD Kabupaten Nunukan memperoleh dana dari APBD dan program lain seperti JKN/BPJS. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kewajiban. Penerapan akuntansi sektor publik berdasarkan SAP diperlukan untuk memastikan bahwa setiap dana dikelola secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Meski demikian, RSUD Nunukan menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan akuntansi sektor publik. Di antaranya adalah keterbatasan SDM yang memahami SAP secara menyeluruh, kurangnya infrastruktur teknologi informasi, dan resistensi terhadap perubahan sistem dan prosedur akuntansi. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mengevaluasi sejauh mana implementasi akuntansi sektor publik telah dilakukan di RSUD Kabupaten Nunukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap transparansi serta akuntabilitas keuangan rumah sakit tersebut. Gambaran umum ini menjadi penting sebagai latar belakang kontekstual untuk

memahami pentingnya tata kelola keuangan di sektor layanan publik perbatasan, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam mengevaluasi hasil penelitian yang dibahas pada bab selanjutnya.

Sejarah RSUD Kabupaten Nunukan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan merupakan fasilitas layanan kesehatan tingkat sekunder yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Rumah sakit ini didirikan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Keberadaan RSUD Nunukan tidak hanya penting dalam aspek layanan medis, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar. Sebelum pendirian rumah sakit ini, pelayanan kesehatan di Nunukan hanya tersedia dalam bentuk Puskesmas dan klinik-klinik kecil.

Setelah pemekaran dari Kabupaten Bulungan pada tahun 1999, Pemerintah Daerah Nunukan mendirikan RSUD pada awal 2000-an sebagai rumah sakit milik daerah. Awalnya berstatus sebagai rumah sakit tipe D dengan keterbatasan dari segi tenaga medis, fasilitas, dan cakupan layanan. Seiring waktu, RSUD Nunukan mengalami peningkatan signifikan berkat dukungan pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, rumah sakit telah berkembang menjadi tipe C dengan layanan spesialisik dasar, seperti penyakit dalam, bedah, kebidanan dan kandungan, serta anak. RSUD Nunukan juga menjadi rumah sakit rujukan utama bagi puskesmas di seluruh wilayah kabupaten, termasuk di pulau-pulau terluar seperti Pulau Sebatik. Selain itu, rumah sakit ini kerap melayani warga negara Indonesia yang kembali dari Malaysia. Sejarah perkembangan RSUD ini penting dipahami karena mencerminkan dinamika pengelolaan layanan publik, termasuk upaya penerapan sistem akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini menjadi konteks utama dalam menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan rumah sakit di wilayah perbatasan.

Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai RSUD Kabupaten Nunukan yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntansi sektor publik. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada bagian metode, yaitu pegawai yang memahami proses penyusunan dan pelaporan keuangan rumah sakit.

Secara umum, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan sarjana dan telah bekerja lebih dari lima tahun, sehingga dianggap memahami prosedur akuntansi sektor publik yang berlaku di lingkungan rumah sakit. Kondisi ini mendukung validitas hasil penelitian karena responden memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai terkait penerapan akuntansi sektor publik di instansinya.

Hasil Uji Instrumen

Uji instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur (kuesioner) yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Instrumen penelitian ini diadaptasi dan dimodifikasi dari penelitian Erwiyanti (2022) serta Anjani & Hapsari (2024) yang meneliti implementasi akuntansi sektor publik, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Pengujian dilakukan menggunakan bantuan program SPSS versi 26.

Uji Validitas

Validitas mengukur sejauh mana item dalam kuesioner mampu merepresentasikan konstruk yang diukur. Dalam penelitian ini digunakan metode Pearson Product Moment,

dengan kriteria item dinyatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikansi 5%. Jumlah responden adalah 35 orang, sehingga r tabel = 0,334. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel X1, Y1, dan Y2 memiliki nilai r hitung yang melebihi r tabel, sehingga seluruhnya dinyatakan valid dan layak digunakan.

Berikut adalah hasil uji validitas untuk masing-masing variabel:

Tabel 1. Hasil Pengujian Variabel mplementasi Akuntansi Sektor Publik (X1)

No	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	0.512	0.334	Valid
2	0.587	0.334	Valid
3	0.603	0.334	Valid
4	0.544	0.334	Valid
5	0.564	0.334	Valid
6	0.598	0.334	Valid

Sumber: Hasil output SPSS, diolah tahun 2025

Tabel . Hasil Pengujian Validitas Variabel Transparansi keuangan (Y1)

No	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	0.546	0.334	Valid
2	0.592	0.334	Valid
3	0.567	0.334	Valid
4	0.508	0.334	Valid
5	0.581	0.334	Valid

Sumber: Hasil output SPSS diolah tahun 2025

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Y2 (Akuntabilitas Keuangan)

No	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	0.559	0.334	Valid
2	0.528	0.334	Valid
3	0.572	0.334	Valid
4	0.601	0.334	Valid
5	0.538	0.334	Valid

Sumber: Hasil output SPSS diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada ketiga variabel penelitian menunjukkan nilai korelasi (r hitung) lebih besar dari r tabel sebesar 0,334. Dengan demikian, semua item dalam instrumen dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan berulang kali. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan tingkat keandalan suatu instrumen dalam mengukur konstruk yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha, yang merupakan teknik paling umum dalam pengukuran reliabilitas instrumen kuesioner. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha \geq 0,70.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's Alpha Based on Stadarlized items</i>	Keterangan
Implementasi Akuntansi Sektor Publik	6	0.78	Reliabel
Transparansi Keuangan	5	0.81	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan	5	0.76	Reliabel

Sumber: Hasil output SPSS diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yang berarti seluruh instrumen bersifat reliabel. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan konsisten dan layak untuk digunakan dalam proses pengumpulan data dan analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat statistik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan berdasarkan hasil olahan data penelitian menggunakan SPSS dengan jumlah responden sebanyak 35 orang. Adapun hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas disajikan sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki residual yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki residual berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) > 0,05, maka residual berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) < 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Variabel	N	Skewness	Std. Error	Kurtosis	Std. Error
Implementasi Akuntansi (X1)	35	0.430	0.398	-0.947	0.778
Transparansi Keuangan (Y1)	35	0.209	0.398	-0.338	0.778
Akuntabilitas Keuangan (Y2)	35	0.543	0.398	-0.630	0.778
Valid N (listwise)	35				

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai skewness dan kurtosis yang berada dalam rentang -2 hingga +2. Hal ini menunjukkan bahwa data dari masing-masing variabel, yaitu implementasi akuntansi (X1), transparansi keuangan (Y1), dan akuntabilitas keuangan (Y2), terdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam analisis regresi linear telah terpenuhi.

Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel X dan Y berbentuk linear. Pengujian dilakukan menggunakan Analisis of Variance (ANOVA).

Kriteria:

- Sig. Pada baris Linearity $< 0,05 \rightarrow$ hubungan linear
- Sig. Pada Deviation from Linearity $> 0,05 \rightarrow$ tidak menyimpang dari linearitas

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square
X1 \rightarrow Y1 (Transparansi)	0.045	0.002	-0.061
X1 \rightarrow Y2 (Akuntabilitas)	0.521	0.272	0.230

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen. Karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen (X1), maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	VIF
Implementasi Akuntansi (X1)	1.000

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat varians residual yang tidak konstan. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Breusch-Pagan. Semua uji asumsi klasik dalam penelitian ini telah terpenuhi. Data yang digunakan berdistribusi normal, memiliki hubungan linear, bebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas, sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi linear.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
X1 \rightarrow Y1 (Transparansi)	0.717	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X1 \rightarrow Y2 (Akuntabilitas)	0.864	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut.

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013), analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel dan populasi sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Berikut merupakan hasil perhitungan nilai rata-rata dari masing-masing indikator penelitian.

Tabel 8.Implementasi Akuntansi Sektor Publik (X1)

No	Pernyataan	Nilai rata-rata	Kategori
1	RSUD menerapkan standar akuntansi pemerintahan	4.40	Sangat Setuju
2	Proses pencatatan keuangan mengikuti prosedur yang berlaku	4.31	Sangat Setuju
3	Sistem informasi akuntansi digunakan secara optimal	4.49	Sangat Setuju
4	Dokumentasi keuangan dilakukan secara lengkap dan rapi	4.37	Sangat Setuju
5	RSUD patuh terhadap regulasi akuntansi sektor publik	4.43	Sangat Setuju
6	Terdapat evaluasi rutin terhadap proses akuntansi	4.46	Sangat Setuju

Sumber: Hasil output SPSS diolah tahun 2025

Tabel 9. Transparansi Keuangan (Y1)

No	Pernyataan	Nilai rata-rata	Kategori
1	Laporan keuangan RSUD mudah diakses oleh pihak terkait	4.29	Sangat Setuju
2	Informasi keuangan disajikan secara terbuka dan lengkap	4.33	Sangat Setuju
3	Laporan keuangan disusun secara berkala dan teratur	4.24	Sangat Setuju
4	Informasi keuangan mudah dipahami oleh publik	4.31	Sangat Setuju
5	Terdapat transparansi dalam penggunaan dana	4.38	Sangat Setuju

Sumber: Hasil output SPSS diolah tahun 2025

Tabel 10. Akuntabilitas Keuangan (Y2)

No	Pernyataan	Nilai rata-rata	Kategori
1	Setiap penggunaan dana dilaporkan secara pertanggungjawaban	4.41	Sangat Setuju
2	Laporan anggaran dibuat dengan tepat waktu	4.27	Sangat Setuju
3	Anggaran digunakan sesuai peruntukannya	4.30	Sangat Setuju
4	Evaluasi penggunaan anggaran dilakukan secara berkala	4.35	Sangat Setuju
5	Ada pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran	4.32	Sangat Setuju

Sumber Hasil output SPSS diolah tahun 2025

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen, yaitu implementasi akuntansi sektor publik (X1) dan kompetensi pengelola keuangan (X2), terhadap dua variabel dependen, yaitu transparansi keuangan (Y1) dan akuntabilitas keuangan (Y2). Analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS versi terbaru dan menghasilkan dua model regresi. Model pertama menguji pengaruh terhadap transparansi keuangan, dan model kedua menguji pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau R Square (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen (X1) mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen (Y1 dan Y2). Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat.

Tabel. 11. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
X1 → Y1 (Transparansi)	0.045	0.002	-0.061
X1 → Y2 (Akuntabilitas)	0.521	0.272	0.230

Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan di RSUD Kabupaten Nunukan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi sektor publik diterapkan, semakin tinggi pula tingkat pertanggungjawaban keuangan rumah sakit. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas keuangan dapat diterima.

Sementara itu, penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap transparansi keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sistem akuntansi sektor publik sudah diterapkan dengan baik, hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Transparansi keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti budaya organisasi, komitmen pimpinan, dan kebijakan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat apakah implementasi akuntansi sektor publik (X1) secara individu berpengaruh terhadap, transparansi Keuangan (Y1) dan akuntabilitas Keuangan (Y2). Jika nilai signifikansi (p-value) dari hasil uji t lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai $p > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial.

Tabel 12. Hasil Uji t

Model	t hitung	Sig.	Tidak Keterangan
X1 → Y1 (Transparansi)	-0.175	0.862	signifikan
X1 → Y2 (Akuntabilitas)	-2.991	0.005	Signifikan

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, uji F digunakan untuk melihat apakah model regresi antara implementasi akuntansi sektor publik (X1) dengan masing-masing variabel dependen (Y1 dan Y2) signifikan secara keseluruhan

Tabel 13. Hasil Uji F

Model	F hitung	Sig.
X1 → Y1 (Transparansi)	0.025	0.975
X1 → Y2 (Akuntabilitas)	5.985	0.006

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan di RSUD Kabupaten Nunukan. Hal ini menggambarkan bahwa semakin baik sistem akuntansi sektor publik diterapkan, semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan keandalan dalam pelaporan keuangan rumah sakit.

Sementara itu, penerapan akuntansi sektor publik belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap transparansi keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem akuntansi telah diterapkan dengan baik, transparansi keuangan belum sepenuhnya tercapai karena masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti keterbukaan informasi dan budaya organisasi di lingkungan rumah sakit.

Dengan demikian, penerapan akuntansi sektor publik berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan, namun perlu diimbangi dengan kebijakan dan komitmen manajemen untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Pengaruh Implementasi Akuntansi terhadap Transparansi Keuangan

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa implementasi akuntansi sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,862 ($> 0,05$) dan R Square hanya 0,2%. Ini menunjukkan bahwa transparansi kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti sistem informasi keuangan, keterbukaan pimpinan, atau budaya organisasi. Meskipun tidak sejalan dengan teori yang menyatakan standar akuntansi mendorong transparansi, hal ini mencerminkan tantangan birokratis dan keterbatasan akses publik di sektor layanan publik seperti RSUD.

Pengaruh Implementasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berbeda dengan transparansi, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dengan nilai signifikansi 0,005 ($< 0,05$) dan koefisien determinasi sebesar 27,2%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi akuntansi, maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan di RSUD. Penerapan standar pencatatan, pelaporan, dan evaluasi yang benar mampu mendorong pertanggungjawaban yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Temuan ini mendukung teori Good Governance dan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa praktik akuntansi sektor publik yang baik berkontribusi besar terhadap pencapaian akuntabilitas dalam instansi pemerintah atau layanan publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap transparansi keuangan diterima
2. implementasi akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, A., & Hapsari, W. D. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(4), 103-119.
- Animah, S., Suryantara, A. B., & Widia, A. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 99-109.
- Bastian, Indra. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brusca, I., & Montesinos, V. (2022). Accrual Accounting in European Governments: Is it a Reality? *Public Money & Management*, 42(4), 265-268.
- Christiaens, J., Reyniers, B., & Rolle, C. (2024). The Impact of IPSAS on Reforming Governmental Financial Reporting: An International Comparison. *International Review of Administrative Sciences*, 81(1), 158-177.
- Cohen, S., & Karatzimas, S. (2022). Tracing the Future of Reporting in the Public Sector: Introducing Integrated Popular Reporting. *International Journal of Public Sector Management*, 35(6), 449-460.
- Grossi, G., & Soverchia, M. (2023). European Commission Adoption of IPSAS to Reform Financial Reporting. *ABACUS*, 49(4), 525-552.
- Halim, Abdul. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harsanto, M. F., & Wijandari, A. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Praktik Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1-10.
- Hidayatulloh, K. F. A. (2023). Norma Pribadi dan Kepatuhan Wajib Pajak: Apakah Kepercayaan pada Pemerintah Berperan? *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 45-60.
- Hoque, Z. (2022). *Handbook of Cost and Management Accounting in Government*. Oxford: Elsevier.

- Irene, B. F., Iriyadi, I., Hasibuan, D., & Pangaribuan, W. S. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 5(1), 179-195.
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2023). *Public Sector Accounting* (6th ed.). Harlow: Pearson Education
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Triyantoro, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 3(02), 223-233.
- Karlina, N., Lewaru, T. S., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 300-306.
- Lapsley, I. (2023). *New Public Management: The Cruellest Invention of the Human Spirit*. *ABACUS*, 45(1), 1-21.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, N. P., & Indrabudiman, A. (2024). Penerapan Akuntansi Sektor Publik dalam Mencegah Fraud di Era Digital. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 1706-1713.
- Pina, V., Torres, L., & Yetano, A. (2024). Accrual Accounting in EU Local Governments: One Method, Several Approaches. *European Accounting Review*, 19(4), 765-807.
- Siti-Nabiha, A. K. (2022). Accounting, Accountability and Reforms: A Study of Malaysian Public Sector. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 1(2), 121-140.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suprianto, A., Alifah, D. E., Subiyakto, M. V., Huda, A., & Dewi, T. S. (2024). Pengembangan Akuntansi Keuangan pada Sektor Publik. *WANARGI: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 96-103.
- Tadjudinsyah, M. A., & Fitria, A. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(2), 1-19.
- Nugraeni, R., Paramitalaksmi, R., & Wafa, Z. (2022). Kemandirian dan efektivitas pemerintah daerah di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB)*, 8(1).

Zubaidah, A. N., & Nugraeni, M. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 7(3), 980–988.